

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dikatakan sudah cukup baik tetapi belum maksimal karena ada kendala-kendala yang dihadapi. Hal ini dapat dibuktikan dalam hasil penelitian dua (2) indikator utama yaitu:

1. Menyelenggarakan Musyawarah Desa

Berdasarkan hasil analisis pada menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyusunan RKPDDes mulai dari mengusulkan, merancang, membahas dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Namun ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran BPD dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan Desa Baumata seperti;

a) Faktor Pendukung

) Kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD

Pola hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan BPD senantiasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain, mereka saling membantu dan mengingatkan dengan niat baik dalam tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai untuk mensejahterakan masyarakat desa dalam rencana kerja pembangunan desa.

) Selalu Terlibat dalam Semua Program Kerja Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa disini BPD selalu berperan aktif dan selalu terlibat baik dalam pelaksanaan pembangunan

yang bersifat fisik maupun non fisik. BPD membangun komunikasi yang baik dan memberikan partisipasi guna melaksanakan rencana program kerja pembangunan desa yang sudah ditetapkan.

b) Faktor Penghambat

) Kurangnya Partisipasi Masyarakat Desa

Peran BPD dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa belum berjalan dengan maksimal disebabkan oleh kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaksanakan program kerja pembangunan desa, sebagian masyarakat tidak turut serta dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan pada awal penetapan RKPDes tersebut dikarenakan masyarakat tidak memahami akan pentingnya program kerja pembangunan desa, yang mana program pembangunan tersebut dibuat agar dapat membantu masyarakat, untuk kepentingan masyarakat juga.

2. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengurus dan mengelola APBDes terhadap rencana kerja pembangunan desa

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pada aspek ini Badan Permusyawaratan Desa Baumata sudah menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari usulan masyarakat yang telah disepakati akan dialokasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berkaitan dengan rencana program dan kegiatan kerja pembangunan desa yang bisa dilaksanakan, adapun program kerja pembangunan desa yang sementara dilaksanakan dan sudah selesai dilaksanakan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah desa disini terlihat baik dan maksimal, Dan juga keterlibatan BPD dalam penyusunan dan penetapan RKPDes yakni menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dan kemudian dalam pelaksanaannya BPD berperan dalam melaksanakan penyusunan RKPDes dan bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang diikutsertakan masyarakat desa dan ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKPDDes.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:

Sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat di tingkat desa, BPD harus sering melakukan koordinasi dalam bentuk rapat internal untuk membahas situasi-situasi yang terjadi di desa, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama yang dihasilkan berdasarkan musyawarah mufakat agar kedepannya bisa berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Surabaya: Kartika.
- Levinso., dan Soejono, soekanto. 2009. *Teori Peranan*. Jakarta: Edisi Baru Raja Grafindo Persada.
- Maleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosdakarya.
- Ndara, Talizidhun. 1987. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bima Aksara.
- Narwoko, J., dan Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Parwoto,. dalam Soehendy. 1997. *Pembangunan Partisipasi*. Jakarta: BKPAN
- Soekanto, Soejono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sumber Dokumen

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Undang-Undang No.6 Tahun 201 Pasal 55 Huruf c tentang *Fungsi BPD dalam pengawasan Kinerja Kepala Desa*
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang *Badan Permusyawaratan Desa*,
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI*.
- Sumber-sumber data Dari Desa Baumata, Tahun 2017.